

**Analisis Multidimensi Kemiskinan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target
RPJMN 2025-2029 di Kabupaten Bogor: Perspektif Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs)**

***Multidimensional Poverty Analysis and Strategies for Accelerating the Achievement of
RPJMN 2025–2029 Targets in Bogor Regency: A Sustainable Development Goals
Perspective***

Gloria Patricia Zalukhu¹, Dicky Adiyaksa²
Universitas Indonesia¹, Bapperida Kabupaten Bogor²

gloria.patricia@ui.ac.id
dickyadiyaksa1909@gmail.com

ABSTRACT

Poverty reduction is a key priority in Indonesia's 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). This study analyzes poverty trends, characteristics, and dynamics in Bogor Regency and examines their linkages with multidimensional poverty. A descriptive-analytical approach is employed using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the 2025 Bogor Regency SDGs Final Report, and sectoral government data. The results indicate that poverty in Bogor Regency has declined consistently and is projected to remain on track to meet the RPJMN 2025–2029 targets. However, aggregate poverty reduction does not fully reflect improvements in the welfare of poor and vulnerable groups. Poverty remains concentrated among informal sector households, rural areas, and populations with limited access to basic services. Multidimensional analysis reveals that income poverty reduction has not been evenly accompanied by improvements in food security, health, and education. Therefore, an integrated poverty reduction strategy is required to ensure inclusive and sustainable development.

Keywords: Multidimensional Poverty, SDGs, RPJMN 2025–2029, Social Vulnerability, Bogor Regency

ABSTRAK

Penurunan kemiskinan merupakan agenda prioritas dalam RPJMN 2025–2029 yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini bertujuan menganalisis tren, karakteristik, dan dinamika kemiskinan di Kabupaten Bogor serta keterkaitannya dengan kemiskinan multidimensi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Laporan Akhir SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2025, dan data sektoral perangkat daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor mengalami penurunan yang konsisten dan secara proyeksi masih berada dalam jalur pencapaian target RPJMN 2025–2029. Namun, penurunan kemiskinan secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan. Kemiskinan masih terkonsentrasi pada rumah tangga sektor informal, wilayah perdesaan, serta kelompok dengan keterbatasan akses layanan dasar. Analisis multidimensi menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan pendapatan belum diikuti secara merata oleh perbaikan pada dimensi ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan Multidimensi, SDGs, RPJMN 2025–2029, Kerentanan Sosial-Ekonomi, Kabupaten Bogor

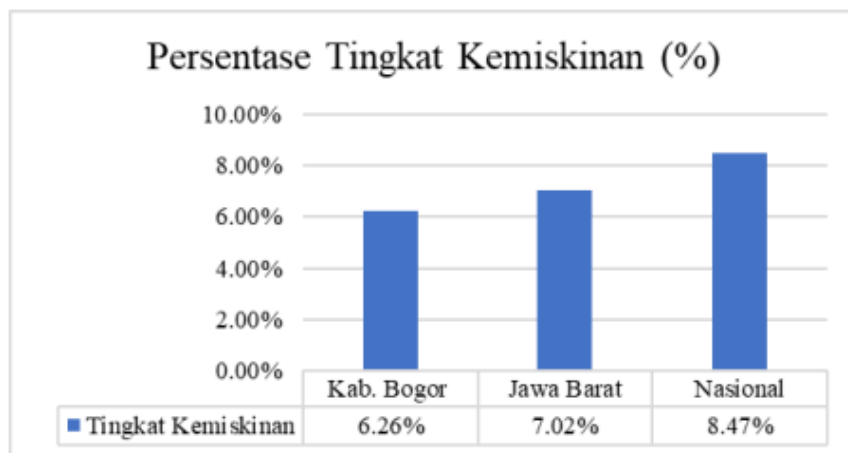
1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada periode 2025–2029 merupakan tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, penurunan kemiskinan dan berkurangnya ketimpangan ditetapkan sebagai salah satu indikator sasaran utama pembangunan nasional, yang menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan menjadi fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang Indonesia. Meskipun berbagai capaian pembangunan telah diraih, kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang bersifat multidimensi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas. Kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan pokok, sementara kemiskinan relatif muncul dari ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat (Rini, 2016). Pendekatan ini diperkuat oleh konsep kemiskinan multidimensi yang menekankan bahwa kegagalan dalam satu dimensi kesejahteraan dapat memperkuat kemiskinan pada dimensi lainnya (Alkire & Foster, 2011).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 diwujudkan melalui delapan Prioritas Nasional (Asta Cita) yang mencakup berbagai sektor strategis. Dalam hal fokus penelitian yang mengerucut pada salah satu sasaran prioritas yaitu Kemiskinan, isu tersebut berkaitan erat dengan empat tujuan SDGs meliputi tujuan 1, 2, 3, dan 4. Melalui RPJMN 2025–2029, posisi empat tujuan tersebut berkelindan dengan target Prioritas Nasional 4: terutama kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif serta prioritas nasional 5 terkait produktivitas ekonomi. (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 sampai dengan 5,0 persen dan rasio gini mencapai 0,290 sampai dengan 0,320 pada tahun 2029 (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Target ambisius ini sejalan dengan komitmen global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), kerangka pembangunan berkelanjutan yang diusung melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) merefleksikan pendekatan multidimensi tersebut dengan menempatkan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) sebagai tujuan utama, sekaligus mengaitkannya dengan tujuan-tujuan lain yang bersifat saling terkait. Laporan SDGs menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali berkelindan dengan kerawanan pangan, permasalahan gizi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta rendahnya capaian pendidikan, yang secara kolektif menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. khususnya Tujuan Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) yang mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dengan populasi terbesar di Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik unik dengan dinamika wilayah rural dan urban yang kompleks. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor mengalami tren penurunan dari 8,13% pada tahun 2021 menjadi 6,26% pada tahun 2025.

Capaian ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,02%) dan nasional (8,47%) pada tahun yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Bappedalitbang Kabupaten Bogor (2025)

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025

Dimensi kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi (Dinas Sosial Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi eksisting menunjukkan bahwa dari 133.232 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024, terdapat kompleksitas permasalahan yang tidak hanya terkait pendapatan tetapi juga akses terhadap layanan dasar. Data laporan SDGs Kabupaten Bogor 2025 mengungkapkan bahwa 22,70% rumah tangga belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sementara 27,70% rumah tangga belum terlayani sanitasi layak pada tahun 2025. Meskipun Kabupaten Bogor memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan laju PDRB per kapita (ADHK) mencapai 4,18 persen pada tahun 2024, distribusi manfaat pembangunan belum merata di seluruh wilayah (BPS dalam Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025).

Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta disparitas akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan di kalangan kelompok rentan. Evaluasi pencapaian indikator SDGs di Kabupaten Bogor memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian dan kesenjangan pembangunan yang menjadi dasar perumusan strategi percepatan menuju target RPJMN 2025-2029. Melalui pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan program perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama, yaitu: Bagaimana strategi penurunan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat dioptimalkan melalui pencapaian indikator SDGs Tujuan 1, 2, 3, dan 4 dalam kerangka pelaksanaan RPJMN 2025-2029?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian indikator SDGs yang relevan dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Bogor, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mempercepat pencapaian target RPJMN 2025-2029 melalui penguatan sinergi

program lintas sektor. Dengan memahami kondisi eksisting, tantangan struktural, dan peluang intervensi kebijakan berbasis data, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta merancang program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat dalam memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas publik, serta mendorong partisipasi multipihak dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang mengkaji isu kemiskinan dan pembangunan daerah, praktisi pembangunan dalam merancang intervensi program, organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi kebijakan, serta lembaga donor dan mitra pembangunan dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas di tingkat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *mixed-method* berbasis data sekunder. Data utama bersumber dari Laporan Evaluasi SDGs Kabupaten Bogor 2025, dan RPJMN 2025-2029. Analisis dilakukan terhadap 148 indikator SDGs yang telah diadaptasi dalam konteks lokal Kabupaten Bogor, dengan fokus khusus pada indikator-indikator yang terkait langsung dengan kemiskinan multidimensional. Periode analisis mencakup data historis 2021-2025 sebagai baseline, dan proyeksi target 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen pendukung di tingkat daerah, laporan pembangunan daerah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan sebagai sumber pembanding dan penguatan analisis. Kota Bogor digunakan sebagai konteks analisis untuk melihat implikasi dan relevansi kebijakan nasional terhadap kondisi kemiskinan di tingkat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan mengidentifikasi tujuan, sasaran, indikator, serta narasi kebijakan yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Data kuantitatif yang tercantum dalam data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan gambaran kondisi eksisting, namun tidak diolah secara statistik. Pemanfaatan data kuantitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat konteks analisis kualitatif dan membantu menjelaskan dinamika kemiskinan multidimensi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai integrasi kebijakan penurunan kemiskinan berbasis SDGs serta kontribusinya sebagai fondasi pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

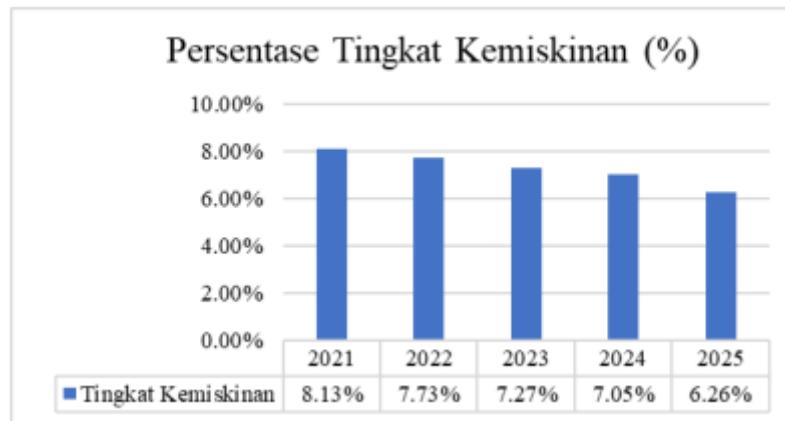
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tren Kemiskinan di Kabupaten Bogor

3.1.1 Dinamika Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor menunjukkan tren penurunan dalam periode 2021 sampai dengan 2025, yang menunjukkan adanya konsistensi. Penurunan kumulatif dari 8,13% pada tahun

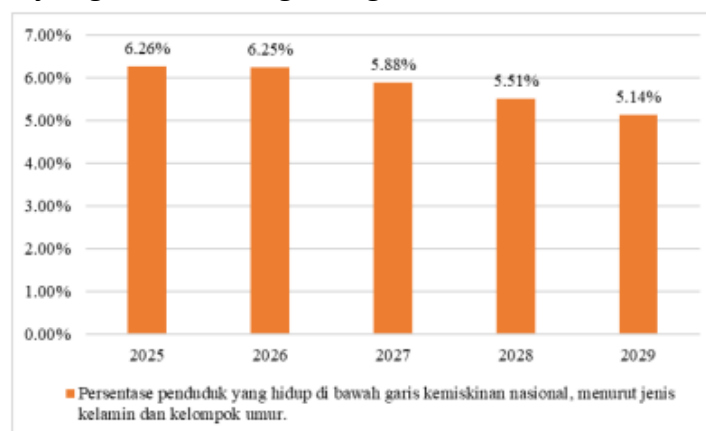
2021 kemudian turun hingga 6,26% pada tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 1,87 persen dalam lima tahun terakhir setara dengan rata-rata penurunan 0,37 persen per tahun. Capaian tersebut telah melampaui batas atas target nasional yang menetapkan sebesar 7,0 - 8,0% untuk tahun 2025. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam kategori daerah dengan kinerja penurunan kemiskinan yang baik. Namun, jika mengacu pada target akhir RPJMN 2029 sebesar 4,5% - 5,0%, maka Kabupaten Bogor masih perlu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,26 sampai 1,76% dalam empat tahun ke depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, dalam Laporan Akhir SDGs Kabupaten Bogor (2025)

Gambar 2. Persentase Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bogor Tahun 2021-2025

Keberadaan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2 menjadi penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, karena memberikan gambaran kuantitatif mengenai laju penurunan kemiskinan yang harus dicapai setiap tahunnya agar selaras dengan target RPJMN 2025–2029. Mengacu pada target akhir RPJMN 2029 sebesar 4,5% - 5,0%, Kabupaten Bogor masih perlu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,26 sampai 1,76% dalam empat tahun ke depan. Keberadaan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2 menjadi penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, karena memberikan gambaran kuantitatif mengenai laju penurunan kemiskinan yang harus dicapai setiap tahunnya agar selaras dengan target RPJMN 2025–2029.

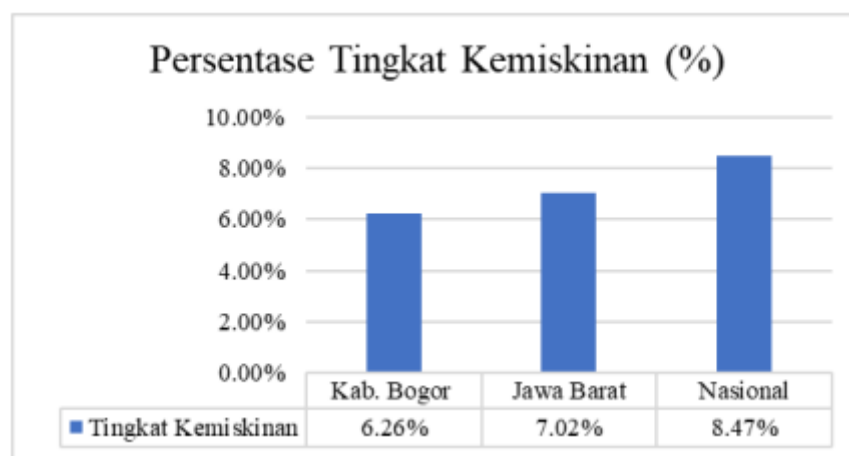


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dalam Bappedalitbang Kabupaten Bogor (2025)

Gambar 3. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Laporan SDGs 2025 memproyeksikan tingkat kemiskinan sebesar 6,25 persen pada tahun 2026, 5,88 persen pada 2027, 5,51 persen pada 2028, dan 5,14 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan rata-rata penurunan sekitar 0,28 poin persentase per tahun. Angka ini secara nominal lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan historis periode 2021–2025 yang mencapai 0,37 poin persentase per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara tren kuantitatif, target RPJMN 2025–2029 masih berada dalam jangkauan kemampuan Kabupaten Bogor. Namun demikian, penurunan yang lebih lambat juga dapat mencerminkan meningkatnya kompleksitas persoalan kemiskinan, sehingga membutuhkan strategi yang lebih terarah dan terintegrasi.

3.1.2 Karakteristik Kemiskinan dan Kerentanan Sosial



Sumber: Badan Pusat Statistik, dalam *Bappedalitbang Kabupaten Bogor* (2025)

Gambar 4. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Gambar 1 Laporan SDGs 2025, perbandingan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor (6,26%) berada di posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,02%) dan angka nasional (8,47%). Selisih 0,76 poin persentase dengan provinsi dan 2,21 poin persentase dengan nasional mengindikasikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik, dukungan infrastruktur yang memadai, serta implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja yang lebih terkonsolidasi.

Laporan SDGs Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi pada wilayah perdesaan, kantong-kantong permukiman padat, serta daerah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kelompok rumah tangga dengan kepala keluarga bekerja di sektor informal, pertanian skala kecil, dan pekerjaan berupah rendah masih mendominasi struktur penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung, tidak seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat secara merata (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Selain itu, tingkat kerentanan terhadap kemiskinan (*near poor*) di Kabupaten Bogor relatif tinggi. Laporan SDGs mencatat adanya proporsi rumah tangga yang berada sedikit di atas garis

kemiskinan dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Kerentanan ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan yang telah dicapai berpotensi tidak berkelanjutan apabila tidak diikuti dengan penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas mata pencaharian.

Penurunan tingkat kemiskinan secara agregat perlu dibaca secara lebih mendalam melalui karakteristik penduduk miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, isu kemiskinan di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dengan stabilitas kesejahteraan kelompok rentan.

3.2. Kemiskinan Multidimensi dalam Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pendekatan multidimensi dalam menganalisis kemiskinan menjadi relevan seiring dengan adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam kerangka ini, kemiskinan tidak lagi dipahami semata sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, serta kualitas hidup yang layak.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dalam Bappedalitbang Kabupaten Bogor (2025)

Gambar 5. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Dalam konteks Kabupaten Bogor, Laporan Akhir SDGs Tahun 2025 menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan pendapatan belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan yang merata pada dimensi non-pendapatan. Pada dimensi Tujuan 1 SDGs, meskipun tingkat kemiskinan menurun, masih terdapat kelompok rentan yang berisiko kembali miskin akibat guncangan ekonomi dan sosial. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor sebagaimana ditunjukkan dalam proyeksi 2025–2029 tidak serta-merta mencerminkan berkurangnya kerentanan sosial-ekonomi. Hal ini tercermin dari Gambar 3. Laporan SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menurun dari 6,26 persen (2025) menjadi 5,14 persen (2029), keberadaan kelompok penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan masih relatif signifikan. Kondisi ini berpotensi terhadap kondisi dimana

sebagian rumah tangga sangat rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila menghadapi guncangan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau risiko kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.

Selanjutnya, pada dimensi Tujuan 2 SDGs, kemiskinan di Kabupaten Bogor berkorelasi erat dengan kerawanan pangan rumah tangga miskin. Laporan SDGs mencatat bahwa akses terhadap pangan bergizi belum merata, terutama bagi rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dan pinggiran perkotaan. Fluktuasi harga pangan memiliki dampak langsung terhadap daya beli kelompok miskin.

Keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor semakin menguat ketika dianalisis melalui Gambar 5 terkait Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang hingga berat berdasarkan kela Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES) justru diproyeksikan meningkat dari sekitar 5,97 persen pada tahun 2025 menjadi 6,41 persen pada tahun 2029. Tren ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dalam aspek pendapatan tidak otomatis berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Peningkatan kerawanan pangan ini mencerminkan keterbatasan daya beli rumah tangga miskin dan hampir miskin, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga pangan. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 2 SDGs di Kabupaten Bogor menjadi sangat relevan sebagai bagian integral dari strategi penurunan kemiskinan, terutama melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi pangan, dan peningkatan pendapatan kelompok rentan. Sehingga memperkuat urgensi kebijakan stabilisasi pangan dan peningkatan pendapatan sebagai bagian integral dari strategi penurunan kemiskinan.

Pada dimensi Tujuan 3 SDGs, kesehatan menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan. Meskipun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bogor relatif tinggi, kualitas dan akses layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Beban biaya tidak langsung, seperti transportasi dan kehilangan pendapatan akibat sakit, masih menjadi faktor yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penguatan layanan kesehatan primer dan pendekatan promotif-preventif memiliki peran strategis dalam mencegah kemiskinan baru.

Sementara itu, dimensi Tujuan 4 SDGs menegaskan peran pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Laporan SDGs Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi, kesenjangan kualitas pendidikan masih terjadi, terutama antara wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas berimplikasi jangka panjang terhadap rendahnya daya saing tenaga kerja dari kelompok miskin di pasar kerja lokal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi agenda kunci dalam percepatan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan. Implikasi terhadap Strategi Percepatan Pencapaian Target RPJMN 2025-2029.

3.3. Implikasi terhadap Strategi Percepatan Pencapaian Target RPJMN 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis tren dan dimensi kemiskinan, percepatan pencapaian target RPJMN 2025–2029 di Kabupaten Bogor memerlukan pendekatan yang lebih terfokus dan terintegrasi. Temuan penelitian ini memperkuat argumen yang dikemukakan dalam RPJMN 2025-2029 bahwa penurunan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Dalam konteks pencapaian RPJMN 2025-2029, Kabupaten Bogor menghadapi empat tantangan utama dalam merealisasikan tercapainya target RPJMN mengenai kemiskinan yang berkelindan dengan 4 tujuan dalam SDGs. Pertama, perlunya transformasi sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan terintegrasi untuk menjangkau seluruh penduduk miskin dan rentan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Ketiga, penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui diversifikasi pangan dan penanganan stunting. Keempat, percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan produktivitas sektor strategis. Integrasi antara agenda RPJMN dan SDGs memberikan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penurunan kemiskinan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kerentanan ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan yang telah dicapai berpotensi tidak berkelanjutan apabila tidak diikuti dengan penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas mata pencaharian. Dengan demikian, isu kemiskinan di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dengan stabilitas kesejahteraan kelompok rentan. Kondisi ini menegaskan urgensi kebijakan stabilitas pangan dan peningkatan pendapatan sebagai bagian integral dari strategi penurunan kemiskinan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan yang relatif baik secara agregat dalam periode 2021–2025 dan diproyeksikan terus menurun hingga tahun 2029. Secara kuantitatif, tren penurunan tingkat kemiskinan berada dalam jalur yang selaras dengan target RPJMN 2025–2029, bahkan melampaui batas atas target nasional pada tahun 2025. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan yang merata pada seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Analisis karakteristik kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bogor masih bersifat struktural dan terkonsentrasi pada kelompok rumah tangga dengan mata pencaharian di sektor informal, pertanian skala kecil, serta wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Tingginya proporsi kelompok near poor mengindikasikan bahwa penurunan kemiskinan yang terjadi masih rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini

menegaskan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan secara agregat belum sepenuhnya menjamin stabilitas kesejahteraan kelompok rentan dalam jangka menengah dan panjang.

Pendekatan kemiskinan multidimensi dalam perspektif SDGs memperkuat temuan tersebut. Penurunan kemiskinan pendapatan tidak selalu berjalan seiring dengan perbaikan pada dimensi non-pendapatan, khususnya ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan prevalensi kerawanan pangan meskipun tingkat kemiskinan menurun menunjukkan adanya kesenjangan antara daya beli dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Sementara itu, keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan serta kesenjangan kualitas pendidikan berpotensi memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi apabila tidak ditangani secara sistematis.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa tantangan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor ke depan bukan hanya terletak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi pada penguatan ketahanan sosial-ekonomi kelompok rentan. Implikasi kebijakan dari temuan ini mengarah pada perlunya strategi penurunan kemiskinan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pengurangan kerentanan, melalui penguatan perlindungan sosial, stabilisasi pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan mata pencaharian yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa pencapaian target RPJMN 2025–2029 tidak hanya tercapai secara statistik, tetapi juga menghasilkan dampak kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor. (2025). Laporan Hasil SDGs Kabupaten Bogor.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Rini, A. (2016). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 17–33.